

ANALISIS EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF PADA SEKOLAH DI DKI JAKARTA

Salsa Ashri Salsabila¹, Zahwa Wahyuni², Najwa Putri Ramadhani³, Nurintan Azurawati⁴
^{1,2,3,4}Manajmen Pendidikan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: salsabilaaa0613@gmail.com

Abstrak

Pendidikan inklusif ialah sistem pelaksanaan pendidikan yang memberi peluang pada seluruh siswa yang mengalami kelainan dan mempunyai potensi kecerdasan dan/atau bakat khusus agar berpartisipasi dalam pendidikan ataupun pembelajaran pada satu lingkup sekolah secara bersamaan dengan siswa secara umum. Peneliti melakukan penelitian dengan menganalisis literatur pendidikan inklusi ini bertujuan agar mengkaji efektivitas pengimplementasian pendidikan inklusi pada sekolah-sekolah di DKI Jakarta. Metode yang peneliti pilih yaitu kualitatif dengan pendekatan kajian literatur sebagai dasar untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai topik yang diteliti. Temuan penelitian mengindikasikan, implementasi pendidikan inklusi di DKI Jakarta belum merata, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta.

Kata Kunci: Pendidikan inklusi, sekolah inklusi, DKI Jakarta

Abstract

Inclusive education is an education implementation system that provides opportunities for all students who have disabilities and have the potential for special intelligence and/or talents to participate in education or learning in one school environment together with students in general. The researcher conducted the research by analyzing the literature on inclusive education with the aim of examining the effectiveness of implementing inclusive education in schools in DKI Jakarta. The method chosen by the researcher was qualitative with a literature review approach as a basis for gaining a deep understanding of the topic being studied. The research findings indicate that the implementation of inclusive education in DKI Jakarta is not evenly distributed, both in public and private schools.

Keywords: *Inclusive education, inclusive schools, DKI Jakarta*

PENDAHULUAN

Pendidikan memainkan peranan krusial dan fundamentalnya tercantum melalui UUD 1945 Pasal 31 ayat (1). Itulah mengapa negara wajib menyediakan hak dan kewajiban mendapat pendidikan agar bisa diterapkan dengan tak ada diskriminasi dan tak mengecualikan siapa pun (Fitriani et al., 2022). Kelayakan pendidikan yang didapat anak termasuk hak mendasar. Tak terkecuali untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Meskipun demikian, tak seluruh ABK sudah bisa menjangkanya dikarenakan beragam

faktor. Di antaranya terbatas instansi pendidikan itu sendiri, ada disparitas antara fasilitas pendidikan di wilayah perkotaan dan pedesaan, lemahnya daya dukung pemangku kebijakan, pandangan publik yang masih stigmatis, kurang memadainya jumlah tenaga pengajar yang berkualitas, serta rendahnya standardisasi dalam mengevaluasi pembelajaran (Fitri, 2021).

Banyak anak yang belum mendapatkan pendidikan dengan layak, sehingga menghalangi mereka dalam mengembangkan bakat dan wawasan. Meskipun mereka memiliki kekurangan tetapi banyak dari mereka yang memiliki kemampuan lebih yang justru tidak dimiliki oleh anak pada umumnya. Dengan demikian pendidikan merupakan hal utama yang di butuhkan setiap individu tanpa terkecuali termasuk ABK. ABK berkarakteristik relatif berbeda dibanding anak lainnya yang mengidap gangguan mental, emosional, ataupun fisik lainnya. Permasalahan belajar dan perilaku, tunagrahita, tunarungu, tunanetra, anak dengan bakat, serta anak yang bermasalah dalam kesehatannya ialah sejumlah contoh ABK (Halidu, 2022).

Pendidikan inklusi diselenggarakan oleh pemerintah untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung, ramah, dan bebas dari diskriminasi, sehingga semua anak dapat belajar bersama dengan optimal (Darma & Rusyidi, 2015). Lewat surat edaran kemendiknas tahun 2010 Dirjen Dikdasmen Depdiknas No. 380/C.C6/MN/2003 20 Januari 2003: "Setiap kabupaten/ kota diwajibkan menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif di sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari: SD, SMP, SMA, SMK" (Hafiz, 2017).

Pendidikan inklusif sudah diberlakukan di sejumlah daerah di Indonesia, satu di antaranya ialah wilayah DKI Jakarta, yang penyelenggaraanya di atur melalui SE No. 119/SE/2016 tentang Sekolah Penyelenggara Inklusi dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Malau et al., 2023). Terkait sekolah penyelenggara inklusi dalam penyelenggaraannya diserahkan kepada semua instansi pendidikan dari mulai TK, SD, SMP, SMA hingga SMK (Rokhim, 2021).

Beberapa penelitian terkait efektivitas implementasi pendidikan inklusi pernah dilakukan oleh (Wijaya et al., 2023), (Haq & Kurnia, 2022), (Sembung et al., 2023). Ketiga peneliti terdahulu memiliki tujuan penelitian yang sama yaitu untuk mengetahui lebih mendalam sekolah tersebut dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi. Tidak hanya menganalisis faktor yang mendukung dan menghambat pendidikan inklusi di sekolah, tetapi mereka juga memberikan solusi konkret pada setiap permasalahan yang di identifikasi.

Perbedaan penelitian ini dibanding penelitian sebelumnya, yakni terkait metode yang dipergunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif dengan kajian studi kasus guna mendorong kemampuan identifikasi ABK pada sekolah inklusi. Sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan untuk mendapatkan wawasan yang komprehensif dan kontekstual mengenai efektivitas pendidikan inklusi di DKI Jakarta serta pengimplementasiannya, dari mulai sisi kebijakannya, implementasi, maupun

tantangannya yang ada pada sekolah-sekolah terkait proses menyelenggarakan pendidikan inklusi.

Peneliti menawarkan kebaruan dalam pemahaman dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendidikan inklusif di wilayah tersebut. Melalui pendekatan metodologi kualitatif, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi keberhasilan dalam aspek konteks dan produk, tetapi juga menyoroti tantangan signifikan yang dihadapi dalam komponen input dan proses. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam memenuhi kriteria tertentu, seperti kesesuaian program dengan regulasi yang ada, masih terdapat banyak aspek yang belum optimal, termasuk dukungan sumber daya manusia dan fasilitas yang ramah disabilitas. Temuan ini memberikan wawasan baru tentang perlunya strategi perbaikan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan efektivitas pendidikan inklusif, serta mendorong agar berkolaborasi yang berkelanjutan antara pemangku kebijakan dan lembaga pendidikan inklusif, serta mendorong kolaborasi lebih lanjut antara pemerintah dan lembaga pendidikan guna menjamin seluruh anak, tak terkecuali ABK, bisa mengakses pendidikan yang sama.

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pengimplementasian pendidikan inklusi pada sekolah-sekolah di DKI Jakarta. Metode kualitatif dengan kajian literatur digunakan untuk mengumpulkan data guna memahami tantangan dan keberhasilan dalam implementasi tersebut. Mengidentifikasi sejauh mana penerapan pendidikan inklusi pada sekolah di DKI Jakarta sebagaimana peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 40 tahun 2021. Memastikan ABK mendapatkan akses pendidikan yang setara dengan anak pada umumnya. Temuan yang dihasilkan harapannya bisa memperkaya keilmuan baru untuk mengembangkan peraturan terkait pendidikan inklusi yang efektif di DKI Jakarta.

METODE

Peneliti menerapkan metode berupa kajian literatur sebagai dasar agar mendapat pengetahuan komprehensif terkait topik yang dikaji. Sumber literatur yang digunakan mencakup berbagai jurnal ilmiah elektronik yang relevan antara tahun 2019-2024, yang dipilih berdasarkan keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Dengan menggunakan sumber-sumber yang terpercaya dan terkini, penulis berupaya untuk menggali berbagai perspektif dan temuan sebelumnya yang dapat mendukung analisis dan kesimpulan dalam penelitian ini. Tahap dalam mengumpulkan datanya diantaranya identifikasi, klasifikasi dan integrasi. Dimana pada tahap yang pertama yaitu indentifikasi penulis menetapkan tujuan, ide, dan gagasan yang jelas, serta melakukan tinjauan literatur yang relevan untuk memverifikasi bahwa sumber-sumber yang dipergunakan sebagaimana masalah yang dikaji. Kedua klasifikasi, yaitu mengelompokan data yang di lakukan untuk mengorganisir informasi yang kompleks menjadi kelompok-kelompok yang lebih mudah dipahami dan dianalisis, dan yang terakhir integrasi yaitu menggabungkan beberapa data yang berbeda menjadi satu kesatuan yang lebih utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelusuran literature yang sesuai dengan kriteria inklusi ditetapkan 5 (lima) artikel. Berikut ini disajikan T(abel 1) beberapa artikel yang meneliti terkait implementasi pendidikan inklusif pada sekolah di DKI Jakarta.

Tabel 1. Artikel Implementasi Pendidikan Inklusi

No	Tahun Terbit	Judul Artikel	Nama Jurnal	Hasil Penelitian
1	2024	Implementasi Pendidikan Inklusif di SMP Negeri 259 Jakarta	Jurnal Sindoro Cendikia Pendidikan	implementasi pendidikan inklusif di SMP Negeri 259 Jakarta cenderung kurang memadai dari segi layanan, fasilitas, sarana dan prasarana nya.
2	2024	Implementasi Program Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Kupu-Kupu Jakarta	Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar	implementasi pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Kupu-Kupu cukup baik karena memperhatikan segala aspek terkait peserta didik, materi pembelajaran, hingga sarana dan prasarana.
3	2022	Evaluasi Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Kecamatan Koja Jakarta Utara	Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran	Implementasi pendidikan inklusif pada SD pada Kecamatan Koja tergolong membutuhkan perbaikan dikarenakan banyak ketidaksiapan dalam setiap unsur CIPP.
4	2019	Gambaran Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar Negeri di Jakarta Barat	Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humainiora, dan Seni	Implementasi pendidikan inklusif pada SD Negeri Inklusi di Jakarta Barat umumnya belum mencapai syarat di tiap aspeknya dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi sebagaimana aturan Permendiknas (2007).
5	2020	Implementasi Program Pendidikan Inklusi di Provinsi DKI Jakarta (Studi di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi)	Jurnal Kebijakan publik dan tinjauan manajemen	implementasi program pendidikan inklusif di DKI Jakarta pada SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi telah terlaksana secara optimal, walaupun masih terdapat beberapa faktor pengambatnya.

Pembahasan

Penyuluhan tentang kebijakan pendidikan inklusif oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta kepada sekolah dilakukan secara daring dan tatap muka, menekankan kewajiban sekolah negeri menerima siswa ABK tanpa penolakan. Selain itu, informasi mengenai PPDB DKI Jakarta, termasuk Jalur Afirmasi untuk Penyandang 8 Disabilitas, disampaikan, serta pedoman dan prosedur yang dapat diunduh publik untuk mempermudah pemahaman alur PPDB 2022 (Malau et al., 2023).

Informasi terkait pelaksanaan pendidikan inklusif sudah disosialisasikan terhadap seluruh instansi sekolah dan terhadap publik, namun masih terdapat sejumlah aspek dalam kebijakan penyelenggaraannya yang dipandang kurang jelas dan membuat bingung. Satu di antara keluhan yang ada ialah penyuluhan yang sebatas menyampaikan regulasinya saja, tak memberi arahan dan membekali proses untuk menerima dan menghadapi peserta didik inklusi terhadap seluruh pengajar. Terdapat keluhan lainnya, yakni terdapat sejumlah publik yang tak memahami karakter anak yang berkategori peserta didik inklusi.

Sebagian besar orang tua siswa yang beranggapan, siswa yang berkategori inklusi dan yang mendaftar lewat jalur penyandang disabilitas sebatas anak dengan disabilitas fisik, padahal anak dengan keterbatasan IQ ataupun anak yang lamban belajar, bisa dikategorikan sebagai siswa inklusi. Kurangnya pemahaman ini berakibat pada sejumlah anak yang melakukan pendaftaran dan diterima lewat jalur zonasi, tapi saat sekolah melakukan tes IQ, hasil yang di dapat mengindikasikan anak tersebut berkategori siswa inklusi. Hal ini tentu membuat jumlah siswa inklusi yang masuk pada sekolah yang tersedia kerap lebih banyak dibanding yang tercantum pada web PPDB SMA DKI Jakarta 2022 (Malau et al., 2023).

Data pada Tabel 1. menunjukkan bahwa keterbatasan dana menjadi masalah utama yang dihadapi oleh hampir seluruh sekolah yang disebutkan. Kondisi ini berpengaruh pada minimnya fasilitas dan sarana prasarana yang memadai, termasuk kurangnya ketersediaan peralatan dan media pembelajaran yang dibutuhkan siswa ABK. Selain itu, keterbatasan dana juga menyebabkan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, seperti guru pendamping khusus, psikolog, dan tenaga ahli lainnya. Akibatnya, implementasi pendidikan inklusi menjadi terhambat dan tidak dapat berjalan efektif. Sekolah-sekolah tersebut belum mampu memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan inklusi yang ditetapkan dalam Permendiknas 2007, hal ini berdampak pada kualitas pendidikan dan perkembangan potensi siswa ABK.

Masalah utama yang dihadapi oleh sekolah-sekolah tersebut adalah keterbatasan dana. Oleh karena itu, Pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih serius dalam bentuk bantuan dana, pelatihan SDM, dan pengawasan yang ketat. Selain itu, peran serta masyarakat juga penting untuk memberikan dukungan melalui donasi, sukarelawan, atau bentuk dukungan lainnya. Dengan demikian, diharapkan sekolah-sekolah dapat memenuhi standar pendidikan inklusi dan memberikan pendidikan yang layak bagi semua siswa, termasuk siswa ABK. Berdasarkan analisis dari permasalahan di atas, peneliti menyimpulkan tantangan yang dapat terjadi dalam proses pengimplementasian pendidikan inklusif. Menurut Pratiwi dalam (Nurhadipa et al., 2024) Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (8) dan Pasal 43 ayat (2) dan ayat (4) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas salah satu tantangan utama dalam pendidikan inklusi adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kebutuhan siswa dengan disabilitas. Banyak sekolah masih belum memiliki fasilitas yang memadai, seperti aksesibilitas untuk kursi roda, toilet yang sesuai, dan peralatan pembelajaran khusus. Dengan keterbatasan ini mempengaruhi kurangnya sekolah dalam pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus. Masalah utama minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki adalah faktor biaya.

Menurut Haryono dalam (Tobasa et al., 2023) Keterbatasan sumber daya juga menjadi tantangan dalam mendisiplinkan siswa berkebutuhan khusus. Banyak sekolah mungkin tidak memiliki cukup jumlah staf atau pelatihan yang memadai dalam hal pendekatan dan strategi untuk mendisiplinkan siswa dengan kebutuhan khusus. Kurangnya dukungan ini dapat menyulitkan sekolah dalam memberikan perhatian individual yang diperlukan kepada setiap siswa.

Winarti dalam (Ramadhana, 2020) menyebutkan kondisi guru belum didukung dengan kualitas guru yang memadai. Keberadaan guru khusus masih dinilai belum sensitif dan proaktif terhadap permasalahan yang dihadapi ABK. Winarti juga menyebutkan bahwa guru belum didukung dengan kejelasan aturan tentang peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing guru. Pelaksanaan tugas belum disertai dengan diskusi rutin, tersedianya model kolaborasi sebagai panduan, serta dukungan anggaran yang memadai. Selain itu, stereotip dan stigma terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus masih merupakan tantangan yang harus diatasi. Masyarakat seringkali memiliki pandangan negatif terhadap mereka, yang dapat menghambat inklusi sejati. Penting untuk mengedukasi masyarakat dan meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak-anak dengan kebutuhan khusus. Melibatkan orang tua dan keluarga dalam proses pendidikan juga penting untuk membangun dukungan sosial yang kuat bagi anak-anak. (Mustika et al., 2023).

SIMPULAN

Mengacu pada temuan penelitian, bisa diambil simpulan, implementasi pendidikan inklusi di DKI Jakarta belum berjalan efektif, dari mulai sekolah negeri sampai swasta. Penyebabnya didasari oleh beberapa data yang peneliti dapatkan. Dari data tersebut faktor utama yang menghambat terlaksananya pendidikan inklusi yang efektif yaitu keterbatasan dana dari pemerintah yang dapat mempegaruhi segi layanan dan fasilitas. Terdapat beberapa tantangan yang dapat terjadi dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kebutuhan siswa dengan disabilitas. Keterbatasan sumber daya juga menjadi tantangan dalam mendisiplinkan siswa berkebutuhan khusus. Banyak sekolah mungkin tidak memiliki cukup jumlah staf atau pelatihan yang memadai dalam hal pendekatan dan strategi untuk mendisiplinkan siswa dengan kebutuhan khusus. kondisi guru belum didukung dengan kualitas guru yang memadai, bahwa guru belum paham dengan kejelasan aturan tentang peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing guru. Pelaksanaan tugas belum disertai

dengan diskusi rutin, tersedianya model kolaborasi sebagai panduan, serta dukungan anggaran yang memadai. Selain itu, stereotip dan stigma terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus masih merupakan tantangan yang harus diatasi. Masyarakat seringkali memiliki pandangan negatif terhadap mereka, yang dapat menghambat inklusi sejati.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, untuk meningkatkan efektivitas implementasi pendidikan inklusi di DKI Jakarta, disarankan agar pemerintah dan sekolah fokus pada pelatihan berkelanjutan bagi guru dalam pengajaran inklusif, peningkatan fasilitas sekolah yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus (ABK), serta penyediaan layanan dukungan psikologis dan sosial bagi siswa. Selain itu, diperlukan pengembangan kurikulum yang fleksibel, sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusi, dan evaluasi kebijakan secara berkala untuk memastikan implementasi yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifa, R. N., & Subowo, A. (2020). Implementasi Program Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta (Studi di SD Negeri Meruya Selatan 06 Pagi). *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(2), 348–365.
- Dea Mustika, Agnes Yurika Irsanti, Evi Setiyawati, Fretika Yunita, Nurhafizdah Fitri, & Putri Zulkarnaini. (2023). Pendidikan Inklusi: Mengubah Masa Depan Bagi Semua Anak. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(4), 41–50. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i4.1575>
- Fitri, S. F. N. (2021). Problematika Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia*, 5, 1617–1620. <https://doi.org/10.52436/1.jpti.26>
- Fitriana, F., Lestari, I., & Sapriati, A. (2022). Evaluasi Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Kecamatan Koja Jakarta Utara. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 5(2), 191–200. <https://doi.org/10.30605/jsgp.5.2.2022.1677>
- Hafiz, A. (2017). Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Inklusif di Indonesia. *Jurnal As-Salam*, 1(3), 9–15.
- Haq, N. Al, & Kurnia, L. K. (2022). Implementasi Sistem Evaluasi dan Penilaian Anaka Berkebutuhan Khusus dalam Pendidikan Inklusi. *Jurnal Pendidikan Sultan Agung*, 2(3), 268. <https://doi.org/10.30659/jp-sa.v2i3.21477>
- Malau, M. M. N., Martini, R., & Fitriyah. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Pada Sma Negeri Di Dki Jakarta. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(2), 70–86.
- Mularsih, H. (2019). Gambaran Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Sekolah Dasar Negeri Di Jakarta Barat. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 3(1), 94.

<https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v3i1.3600>

- Madhuma Acharee Nazhelya Najva¹, R. K. T., & Bukhari³, M. K. (2024). Implementasi Program Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Kupu-Kupu Jakarta. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 09(September), 243–255.
- Ramadhana, R. N. (2020). Tantangan Pendidikan Inklusi Dalam Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus. *Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Lambung Mangkurat*, 1–10. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/n8rxu>
- Robiatul Munajah, Arita Marini, M. S. S. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Cakrawala Repositori IMWI*, 6(4), 613–621. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i4.384>
- Rokhim, A. (2021). Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Negeri Jakarta. *Seminar Nasional Hasil Riset Dan Pengabdian Ke-III*, 535–540.
- Romadhon, M., Marini, A., & Sumantri, M. S. (2021). Kebijakan Pendidikan Inklusi Sebuah Solusi di Sekolah Dasar. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 4(1), 109–115. <https://doi.org/10.31949/jee.v4i1.3085>
- Safitri, D., Ilmu, P., Sosial, P., Jakarta, U. N., Inklusif, P., & Khusus, G. P. (2024). *Implementasi Pendidikan Inklusifdi Smp Negeri259 Jakarta*. 4(12).
- Sembung, M. P., Rotty, V. N. J., & Lumapow, H. R. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.
- Siti Nurhadipa, Pradika Lilia Ratna, Nisa Ulhasanah, & Opi Andriani. (2024). Tantangan Pendidikan Inklusi Berdasarkan Peraturan Perundangan Di Indonesia. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*, 4(1), 160–164. <https://doi.org/10.55606/cendikia.v4i1.2384>
- Tobasa, M. R., Husna, D., & Nurjanah, P. W. (2023). Tantangan dan Strategi Mendisiplinkan Siswa Berkebutuhan Khusus dalam Pendidikan Inklusif: Tinjauan dari Perspektif Studi Literatur. *Anwarul*, 4(1), 207–217. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v4i1.2375>
- Wijaya, S., Supena, A., & Yufiarti. (2023). Implementasi Program Pendidikan Inklusi Pada Sekolah Dasar di Kota Serang. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(1), 347–357. <https://doi.org/10.31949/educatio.v9i1.4592>